

**PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN
MANDAU PASCA PEMEKARAN TAHUN 2015**

Oleh :

Sarah Khairani

Email : sarahkhairani1@gmail.com

Pembimbing : Dr. Muchid, S. Sos, M. Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761

– 63277

ABSTRACT

Planning is a requirement for the implementation of good development, which the involvement of the society is very important in development planning in order the result of the policy will be appropriate on target. Development planning is arranged participatoryly is a plan that involve the society. Deliberation of development planning is one of public vehicle to optimize the utilization of society participation in the planning arrangement. However, in the process of participatory planning there are several phenomena namely the implementation of development Tambusai Batang Dui Village is not in accordance with existing planning and development is not in accordance with the standards of eligibility has been established.

The purpose of the research is first to know the participatory planning of Tambusai Batang Dui Village and also the factors influencing the participatory planning. This research uses the theory of Participatory Planning. The approach used in this research is qualitative approach. Type of research data is primary data and secondary data. Technique of collecting data in this research is documentation, interview, and questionnaire. Analysis technical of data used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the participatory planning process is less than the maximum can be seen from the participatory planning processes Tambusai Batang Dui Village are investigation, formularization problem, support identification from the society , the purpose formularization, detailed steps, and designing budgets that are not fully participatory. There are several factors that influence the participation of the society, namely awareness and willingness of society, education, income, leadership of village government and facilities.

Keywords: planning, participatory planning

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu: demokrasi, peran serta masyarakat, memperhatikan keanekaragaman daerah, pemerataan keadilan serta terkelolanya sumber daya di Daerah secara efisien dan efektif diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan masyarakat di Indonesia saat ini.

Seiring dengan hal itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka penataan pemerintahan dilakukan di berbagai wilayah pemerintahan melalui pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemekaran Desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah Desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat.¹

Pemekaran Desa Balai Makam didasari beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak meratanya pembangunan disetiap sisi Desa, sehingga masyarakat yang terletak jauh dari pusat Desa tidak kebahagiaan masalah pembangunan, seperti permasalahan prasarana fisik yang rendah yaitu jalan-jalan Desa yang masih memerlukan pembenahan untuk kelancaran akses dan pembenahan serta pembuatan Drainase.

2. Kebutuhan untuk mengatasi rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat.
3. Kurang efektifnya pelayanan publik, dengan pemekaran maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia serta meningkatkan
4. pemerintah dan pengelolaan pembangunan

Tabel 1.1
Pembangunan Desa Pra dan Pasca
Pemekaran

No	Jenis pembangunan	Keterangan (jumlah)	
		Pra pemekaran	Pasca pemekaran
1.	Pembangunan jalan aspal dan drainase	Ada (baik, rusak)	Ada (baik, rusak)
2.	Sarana penerangan (lampu jalan)	Tidak ada	Ada (Baik)
3.	Sarana pendidikan	Ada (5/baik)	Ada (3/baik)
4.	Sarana pelayanan kesehatan (puskesmas)	Ada (1/baik)	Ada (1/baik)
5.	Sarana Olah raga	Ada (1/baik)	Tidak ada
6.	Pasar Desa	Ada (1/baik)	Tidak ada
7.	Rumah ibadah	Ada (24/baik)	Ada (12/baik)

¹ Pirdo Mangantur MS Dan M.Y, Tiyas. *Evaluasi Desa Pemekaran Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu

8.	Kantor kepala Desa	Ada (1/baik)	Ada (1/baik)
9.	Kantor BPD	Ada (1/baik)	Tidak ada

Sumber : Observasi tahun 2017 dan Buku monografi Desa

Setelah pemekaran intensitas pembangunan Desa lebih efisien dibandingkan sebelum pemekaran. Terdapat beberapa pembangunan lainnya yang berdampak pada pemekaran yaitu antara lain pengadaan lampu jalan dimana sebelum pemekaran sarana penerangan tidak ada. Sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah ibadah, dan kantor kepala Desa tetap ada dan tetap dalam kondisi baik. Sedangkan sarana olah raga, pasar Desa, dan kantor BPD yang sebelumnya tersedia menjadi tidak tersedia.

Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan tidak akan menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Di samping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat.

Bahkan tidak jarang pula terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Karena itu sangat tepat perencanaan partisipatif diterapkan untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.²

Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).³ Musrembang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan untuk memahami isu-isu dan permasalahan daerah untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan. Serta merupakan wahana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Namun pola perencanaan dari bawah ke atas ini belum banyak menjanjikan aspirasi murni warga Desa didengar, padahal Musrembang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan.

Namun pola perencanaan dari bawah ke atas ini belum banyak menjanjikan aspirasi murni warga Desa didengar, padahal Musrembang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan.

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan terkait perencanaan partisipatif Desa Tambusai Batang Dui, yang di antaranya :

1. Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan yang tepat sasaran dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena

² Sjafrizal, 2016, Perencanaan Pembnagunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 29

³Sjafrizal, Op.Cit, hlm 91

masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki.

2. Pelaksanaan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Pemerintah Desa mengambil keputusan sepihak dengan mengabaikan perencanaan yang telah disepakati bersama untuk menjadi prioritas pembangunan Desa.

3. Pembangunan tidak sesuai dengan standar kelayakan yang telah ditetapkan, sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perencanaan Partisipatif Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Pasca Pemekaran Tahun 2015”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian adalah : “Bagaimana perencanaan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Pasca Pemekaran Tahun 2015?”

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Dari beberapa studi terdahulu, skripsi oleh Tri Ananda Putri dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Mandiri Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2013)” fokus disini adalah terhadap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Mandiri dimana kurang optimalnya program dari segi partisipasi

masyarakat. Dengan pendekatan pelaksanaan program yakni pemberdayaan masyarakat artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pasca pelaksanaan fisik) melibatkan partisipasi masyarakat aktif yang tertera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan Mandiri di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang.

Selanjutnya dalam skripsi Isnadi dengan judul “Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kebumen”, fokus pada penelitian ini adalah keberhasilan perencanaan partisipatif tersebut, hasil penelitian menunjukkan perencanaan partisipatif melalui musrembang memang mampu menampung aspirasi masyarakat.

2. Konsep Teori

a. Perencanaan Partisipatif

Siagian berpendapat bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Abe Alexander mengungkapkan bahwa Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan

⁴ Siagian, S.P,1989, *Administrasi pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.50.

rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.⁵

Menurut Alexander Abe, langkah-langkah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintah daerah sebagai berikut: Pertama, yaitu, penyelidikan, kedua, perumusan masalah, ketiga, identifikasi daya dukung, keempat rumusan tujuan, kelima langkah rinci, dan keenam merancang anggaran.⁶

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu kesadaran dan kemauan masyarakat, pendidikan, pendapatan, kepemimpinan pemerintah Desa dan fasilitas.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, penelitian dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

⁵ Abe, Alexander. 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo, Pondok Edukasi, hlm: 81.

⁶ Ibid, Abe

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui

Dalam mengelola pembangunan daerah setiap pemerintah daerah mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan, perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik. Oleh sebab itu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik dan mencapai tujuan suatu pemerintah Desa harus melakukan perencanaan.⁸

Dalam membuat suatu perencanaan yang baik maka unsur penting yang harus terlibat adalah masyarakat, karena jika melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maka pembangunan yang dihasilkan dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-undang No.24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan. Bentuk dokumen perencanaan Desa yaitu berupa Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat Desa, yaitu melalui Musrebang yang bersifat partisipatif.

⁷ Sugiyono, *Op., Cit*, hlm. 244.

⁸ Siagian, S.P, 1989, *Administrasi pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.50

Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di perlukan koordinasi antar instansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan di dalam Musrembang

Kegiatan Musrembang Desa Tambusai Batang Dui menjadi agenda rutin Desa Tambusai Batang Dui, sebagaimana disampaikan Bapak Nizam selaku Kepala Desa Tambusai Batang Dui:

“Adapun diadakan musrembnag adalah untuk menentukan arah pembangunan desa kedepannya. Musrembang merupakan kegiatan rutin setiap Desa, kemudian usulan akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, untuk ditingkatkan ke kabupaten sesuai instruksi camat Mandau agar menghasilkan 10 pembangunan yang termasuk dalam skala prioritas dan nantinya akan diantarkan ke tingkat kecamatan”.
(Hasil Wawancara 31 Agustus 2017)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Musrembang merupakan sebuah agenda rutin yang dilakukan untuk menentukan arah pembangunan kedepannya, dengan menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan diusulkan ke tingkat kecamatan.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan Murembang hanya sebuah formalitas, masih banyak dalam hasil perencanaanya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat Musrembang merupakan wujud tanggungjawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, namun di Desa Tambusai Batang Dui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat masih kurang, hal ini dapat dilihat dalam daftar kehadiran masyarakat saat mengikuti rapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Daftar Hadir Musrembang Desa Tambusai Batang Dui tahun 2015

No.	Peserta yang wajib diundang	Daftar hadir
1.	Masyarakat	19
2.	Organisasi Desa	5
3.	Aparat Desa	32
3.	Aparat Kecamatan	1

Sumber: Kantor Desa Tambusai Batang Dui

Dari tabel daftar hadir peserta musrembang Desa di atas dapat dilihat dimana sebanyak 57 orang dan hanya 19 orang masyarakat yang hadir. Hal tersebut menjadi penanda bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat Musrembang bisa dikatakan sangat rendah.

Berikut adalah proses perencanaan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui :

1. Penyelidikan

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelidikan ini menjadi faktor kunci, karena masyarakat diajak untuk menumpulkan, menggali, dan mengenali dengan seksama problem yang mereka hadapi. Dalam proses perencanaan partisipatif di Desa Tambusai Batang Dui, pada tahap penyelidikan dapat diketahui keterlibatan masyarakat Desa sebagian sudah di mulai dari tingkat RT dan RW sampai dengan saat pelaksanaan Musrembang Desa.

2. Perumusan Masalah

Dalam proses perumusan masalah Desa Tambusai Batang Dui tidak melibatkan stakeholder terkait. Padahal proses perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah pelibatan semua pihak dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

c. Identifikasi daya dukung

Identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan partisipatif ini sudah terlihat dalam musrembang Desa yang

dihadiri oleh masyarakat yang kemudian menghasilkan prioritas-prioritas pembangunan sudah merupakan daya dukung yang diberikan oleh masyarakat.

d. Perumusan tujuan

Untuk menghasilkan program pembangunan yang efektif, syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Transparan, bahwa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat RT sudah diketahui oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat saat masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah dan mengusulkan kegiatan yang dimulai dari tingkat RT sampai dengan Musrembang, kemudian pemilihan tim perumus yang dipilih dalam forum terbuka, namun hasil yang telah dibuat oleh tim perumus tidak melibatkan stakeholder.

2) Responsif, bahwa program pembangunan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena rancangan dari pihak-pihak tertentu saja. Namun dalam pembangunan yang dilakukan di Desa Tambusai Batang Dui belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat setempat.

3) Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam musrembang dapat lebih serius dalam memperhatikan dan mengangkat isu yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

4) Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

e. Menetapkan langkah-langkah secara rinci

Berkaitan dengan penetapan langkah-langkah rinci dalam perencanaan partisipatif

di Desa Tambusai Batang Dui bahwa tidak terdapat langkah-langkah rinci dalam hasil musrenbang dikarenakan hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan, karena sifatnya usulan belum tentu direalisasikan sehingga kalau dipaksakan dikhawatirkan sia-sia karena dengan melihat musrenbang sebelumnya banyak kegiatan yang diusulkan tapi tidak bisa direalisasikan.

f. Merancang anggaran.

Merancang anggaran tidak ada dalam Perencanaan partisipatif di Desa Tambusai Batang Dui, seperti di jelaskan sebelumnya bahwa hasil musrenbang hanya usulan kegiatan. Dalam masalah ini pemerintah pusatlah yang merancang anggaran dan pembangunan dilakukan berdasarkan jumlah anggaran yang diberikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Partisipatif Desa Tambusai Batang Dui

Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Tambusai Batang Dui adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

1. Kesadaran/Kemauan Masyarakat

masyarakat mengerti akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Desa, dan keberhasilan dari pembangunan Desa tersebut tergantung bagaimana partisipasi masyarakat Desa. karena Masyarakat juga sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa. Melalui masyarakat pemimpin mengetahui berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu pembangunan yang berlandaskan pada potensi dan

kemampuan masyarakatnya akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan harus dilakukan pembangunan yang partisipatif, dimana masyarakat berperan aktif dan atau ikut serta dalam proses

2.Pendidikan

tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambusai Batang Dui bahwa masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting apabila pendidikan tinggi maka partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan

Dalam hal ini tingkat pendapatan jika dihubungkan dengan partisipasi masyarakat. dalam pembangunan desa sangat berarti orang yang berpenghasilan rendah sangat sulit melibatkan diri berpartisipasi dalam bentuk uang (dana). Kemudian yang berpenghasilan sedang dan tinggi rata-rata memberikan sumbangan uang (dana), maka jelas bahwa partisipasi masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan sedang lebih tinggi dibandingkan yang berpenghasilan rendah.

3.Kepemimpinan Pemerintah Desa

Peran pemimpin dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemimpin serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pembangunan. Maka dari itu perlu kerjasama antara pemerintahan desa sebagai pemimpin pemerintahan dan masyarakat dalam melakukan program pembangunan, serta bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa memimpin anggotanya dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya usaha pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Karena dengan itu pemerintahan desa bisa mengetahui kebutuhan masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang akan

dilaksanakan, begitupun sebaliknya masyarakat bisa berpartisipasi mengelurakan aspirasi dan tenaganya dalam pembangunan tersebut. Untuk itu interaksi dan hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat harus dipelihara.

Kesimpulan

Konsep perencanaan partisipatif pada penelitian ini menurut Abe merupakan pola perencanaan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat, berbasis pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Partisipatif Desa Tambusai Batang Dui belum maksimal, hal ini dapat dilihat 6 proses perencanaan partisipatif yaitu, penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, rumusan tujuan, langkah rinci, dan merancang anggaran, yang dalam pelaksanaannya masih belum menentukan kebutuhan riil masyarakat, pelaksanaan musrembang yang merupakan sarana publik untuk mengemukakan pendapat hanya menjadi sebuah formalitas, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan partisipatif yaitu : faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya kesadaran dan kemauan masyarakat, pendidikan, dan pendapatan. faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar di luar diri masyarakat kepemimpinan pemerintah Desa.

Saran

a. Keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan dalam proses pembangunan, baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan hingga pada evaluasi. Jadi disarankan agar pemerintah desa agar bisa

mendorong semangat masyarakat dalam kegiatan pembangunan partisipasi.

b. Musrembang Desa merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa, sehingga pemerintah Desa harus lebih memperhatikan setiap hasil Musrembang. Sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Jaya Dinata, Pramandika, 2006, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung, Penerbit ITB.

Adisasmita Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Wasition Sadu, Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.

Listyaningsih, 2014, *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu.

Siagian, S.P, 1989, *Administrasi pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.

Abe, Alexander. 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo, Pondok Edukasi.

Sirajuddin, dkk. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta, Yappika.

Coralie Bryant, Louise G.White, 1990, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, LP3ES.

Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.

Djam'an Satori, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:, Alfabeta

Adisasmita Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu

B. Jurnal dan Skripsi:

Duwiri, Yacobus, Nursini, dan Doroteus Martyan. Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Gemba Raya Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (UNTAN). Kalimantan Barat: 2014

Pirdo Mangantur MS Dan M.Y, Tiyas. Evaluasi Desa Pemekaran Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau (UR). Pekanbaru: 2013

Agus Harto Wibowo. Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang. Magister Administrasi. Universitas Diponegoro. Tahun 2009.